



OPTIMALISASI INDUSTRI PERKAPALAN GUNA MENINGKATKAN INDUSTRI JASA MARITIM DALAM RANGKA MENDUKUNG STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DI LAUT

Hartadi Eko Prasetyo

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut
Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230
dalbo.popeye@gmail.com

Abstract. *Indonesia is a country that has a strategic position because it is located at the crossroads of the world. Because of its location, of course it is the target of other countries to control it. This has the potential to threaten national defense. Therefore, to overcome disturbances, both from outside and within the country, and to build defense and security forces, a strong national defense at sea is needed. On the one hand, the rapid development of world science and technology has and will affect the national strategic environment. Until 2045, it is estimated that developed countries will continue to dominate technological innovation. This is mainly supported by the education system, commercial infrastructure, research facilities and infrastructure and large funds. The existence of such rapid technological developments greatly affects the industrial sector, especially the shipping industry throughout the world. Each country is competing with each other to create warships that have advanced and modern technology in order to win trade and strengthen their country's combat fleet. Indonesia is no exception, which is currently trying to align its role in the international arena and is also participating in the development of shipping technology in an effort to improve the maritime service industry. This can be a strategic stepping stone as a way to improve national defense, especially in the maritime area. Maritime is not only a fishery and maritime issue, but maritime is all activities related to maritime/marine either directly or indirectly, for example the shipbuilding industry, shipping technology, ship design, ship repair, ship component manufacturing and others. Then from export / import activities, namely maintenance, supply, repair, loading and unloading, ship brokerage services, insurance for sailors, transportation and port services. Therefore, it is appropriate for our country to pay continuous attention to the maritime industry, so that it can take appropriate policies to optimize it.*

Keyword: *Shipping industry, maritime service industry, national defense at sea.*

PENDAHULUAN

Faktor yang mempengaruhi mengapa negara Indonesia sangat bergantung dengan lautan adalah bahwa kurang lebih 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Kedua 90% jalur perdagangan menggunakan transportasi laut. Ketiga, pada garis pantai banyak terdapat kota dan pemukiman besar dalam radius 200 km. Keempat Hukum internasional memberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya laut. Jika Indonesia tidak segera membangun kemampuan *sea power* akan mengakibatkan ketidakmampuan negara untuk menjaga dan mengendalikan perairan laut Indonesia, seperti ancaman sengketa perbatasan laut, gangguan keamanan laut, pelanggaran hukum laut, perebutan sumber daya alam dan mineral. Pertahanan negara di laut akan bergantung kepada sejauh mana pemberdayaan



kekuatan nasional bidang maritim agar dapat dijadikan modal dasar pembangunan bagi kepentingan nasional. Pendayagunaan kekuatan bidang maritim diarahkan untuk memelihara dan memantapkan kemampuan pertahanan negara di laut serta sebagai kekuatan pendukung dan cadangan atau pengganda bagi TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut. Penyiapan kekuatan cadangan maupun kekuatan pendukung di bidang maritim tidak hanya bertumpu pada penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) saja, akan tetapi melibatkan seluruh komponen Industri Jasa Maritim (Injasmar) yang terdiri dari Industri Perkapalan, Jasa Pelayaran dan Pelabuhan, Industri Perikanan, Industri Pertambangan Minyak, Gas dan Mineral Lepas Pantai serta Industri Wisata Bahari.

Banyaknya kendala yang dihadapi oleh industri perkapalan nasional membuktikan bahwa ada yang salah dari pengelolaan industri perkapalan yang saat ini dilakukan atau kurangnya perhatian pemerintah untuk mengembangkan industri perkapalan sebagai salah satu industri utama penggerak ekonomi nasional. Permasalahan yang dihadapi industri perkapalan nasional dapat digolongkan menjadi dua kelompok yakni masalah internal dan masalah eksternal. Permasalahan yang dihadapi oleh industri perkapalan merupakan dilema yang dihadapi oleh pemerintah dan calon pengguna kapal. Produk yang dihasilkan khususnya kapal untuk keperluan TNI AL dituntut memiliki spesifikasi yang canggih yang berkualitas tinggi dalam menunjang operasional pengamanan laut di Indonesia, sedangkan pada sisi lainnya ketidaksiapan industri perkapalan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista dari permintaan kementerian Pertahanan.

Salah satu upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan dilaut membutuhkan industri perkapalan yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan Alutsista matra laut, karena saat ini kondisi industri perkapalan di Indonesia masih belum bisa mandiri sehingga diperlukan optimalisasi industri perkapalan di Indonesia. Beberapa hal yang mungkin perlu dikaji adalah bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan, bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia.

Peran Injasmar guna mendukung pertahanan negara di laut belum diberdayakan atau dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu perlu adanya suatu konsep strategi pemberdayaan injasmar dalam mendukung pertahanan negara di laut melalui pemanfaatan industri jasa maritim secara optimal serta terjalannya sinergitas antara TNI Angkatan Laut dengan kekuatan maritim lainnya, Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektif guna mewujudkan Kemampuan Maritim dalam mendukung Strategi Nasional dan Strategi Besar bidang Maritim, Strategi Pertahanan Negara di Laut.

METODE PENULISAN

Penulisan ini membahas mengenai bagaimana mengoptimalkan peran dari industri perkapalan di dalam kontribusinya meningkatkan industri jasa maritim sehingga diharapkan dapat mendukung strategi pertahanan negara di laut berdasarkan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data dari proses penggalian sumber data melalui studi kepustakaan (*Library research*) berupa buku-buku, jurnal atau artikel, arsip, surat kabar, dan internet, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Hakikat pertahanan negara

Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem yakni Sistem Pertahanan Semesta yang memadukan pertahanan militer dan nir militer dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional. Pertahanan militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan pertahanan nir militer adalah peran serta rakyat dan seluruh sumber daya nasional selain militer dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Inti pertahanan nir militer adalah pertahanan non fisik dalam pengertian bukan perlawanan bersenjata, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial



budaya dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga merupakan daya tangkal bangsa. Pertahanan nir militer tidak terbatas pada perwujudan daya tangkal bangsa melalui pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam kondisi apapun pertahanan militer dan nir militer harus selalu bersinergi untuk mempertahankan integritas dan kedaulatan bangsa dan negara melalui pendinamisasian segenap potensi dan kekuatan nasional untuk pertahanan. Wujud konkret sinergi pertahanan militer dan nir militer pada kondisi ini adalah perlawanan semesta. Uraian diatas menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pemberdayaan peran armada pelayaran nasional sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara.

Sejarah dan Karakteristik Pertahanan Maritim

Konsep pertahanan strategis wilayah maritim era klasik didasarkan pada kerangka politik-strategis dan teknologi pada periode yang menjadi dasar historisnya dan waktu di mana konsep tersebut dirumuskan. Konsep-konsep tersebut juga mencerminkan kepentingan nasional dan kemungkinan-kemungkinan penyusun rumusannya. Bagi Alfred T. Mahan, laut merupakan bentuk perjalanan cerita pertahanan negara yang luar biasa, karena sifat wilayahnya yang terbuka untuk semua sehingga memungkinkan pergerakan bebas bagi kapal yang bermuatan manusia dan barang. Banyak ahli yang mencatat bahwa sejarah kekuatan maritim menunjukkan dampak besar transportasi laut terhadap perdagangan, kekayaan, dan kekuatan bangsa, sekaligus mengungkapkan bagaimana perselisihan dan persaingan di laut sering berujung pada konflik bersenjata. Jadi, menurut Mahan pengendalian laut adalah faktor utama yang diperhatikan oleh seluruh negara dalam sejarah dunia (Mahan, 1687).

Pemanfaatan potensi nasional

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan adanya peningkatan dan penambahan infrastruktur Industri dan Jasa-jasa Maritim, Industri Perkapalan, Realisasi Tol Laut, dan pelabuhan. Perlunya Peningkatan Koordinasi dengan Kementerian lainnya untuk membicarakan persoalan ini seperti Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan. Sebaiknya seluruh masalah kepelabuhanan diserahkan satu pihak, misal ke Pelindo, dan Kementerian Perhubungan cukup menangani regulasi dan infrastruktur saja, sehingga birokrasi lebih sederhana dan terjadi efisiensi biaya.

Dalam membangun industri perkapalan, memerlukan banyak peran dari berbagai instansi dan lembaga atau badan nasional yang memiliki kompetensi untuk membenahi permasalahan yang ada di dunia perkapalan nasional khususnya dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista untuk pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu diantaranya adalah peran dari pemerintah sebagai pihak regulator yang mengelola industri perkapalan di dalam negeri.

Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 menargetkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan keamanan (Alpalhankam) periode tahun 2015 – 2024 menggunakan produksi dalam negeri sebesar 40% dan menggunakan hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) Nasional sebesar 13%. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa negara saat ini sudah mulai melirik hasil inovasi dan karya anak bangsa dalam mengembangkan industri pertahanan dalam lingkup yang lebih kecil adalah industri perkapalan. Beberapa universitas yang memiliki fakultas teknik perkapalan dilibatkan dalam proyek penelitian dan pengembangan tersebut, seperti Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya serta beberapa universitas lainnya.

Salah satu bentuk inovasi anak bangsa dalam bidang industri perkapalan adalah adanya Eco-Innovation pada industri perkapalan di Jawa Timur untuk mengurangi inefisiensi sumber daya dan peningkatan kapasitas galangan kapal, melalui platform hijau. Pada penelitian ini juga dilakukan pengembangan paket alat khusus untuk memungkinkan keterlibatan UKM dalam eco – inovasi di industri galangan kapal Jawa Timur. Dengan integrasi metode Integration Definition Function Modelling (IDEF0), Life Cycle Analysis, Metode for Inventive Problem Solving (TRIZ,) dan Eco-Compass diagram didapat solusi untuk eco-innovation di industri perkapalan sebagai berikut:



- a) Peningkatan kapasitas kapal,
- b) Optimasi bentuk lambung,
- c) Penggunaan energi alternatif (LNG),
- d) Sumber Energi Alternatif (Solar cell),
- e) Penggunaan material konstruksi ringan,
- f) Optimasi desain baling- lambung-kemudi ditambah perubahan yang relevan,
- g) Pada tubuh memanjang kapal,
- h) Optimasi desain baling-lambung-kemudi lambung-kemudi ditambah perubahan yang relevan,
- i) Pada tubuh memanjang kapal,
- j) sistem pelumasan udara lambung

Penguatan sektor penyediaan bahan baku

Penerapan UU No 4 Tahun 2009, terkait kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, menimbulkan permasalahan pada perusahaan yang masih belum membangun pabrik peleburan. Oleh karena itu, PT SILO dan PT SSP yang bergerak dalam pengolahan bijih besi diizinkan untuk menjual produknya yang baru sebatas konsentrat ke luar negeri (ekspor) per enam bulan, sejalan dengan kemajuan program (roadmap) pembangunan pabrik peleburan besi hingga tahun 2017. Kalau rencana pembangunan industri baja berbasis besi dari 9 perusahaan terealisasi, diperkirakan akan membutuhkan pasokan bijih/pasir besi dan pellet total sekitar 21,166 juta ton per tahun. Hal tersebut akan memperkuat industri logam nasional.

Oleh karena itu yang harus dilakukan pemerintah, antara lain penjabaran roadmap terutama pada pembangunan industri hulu (peleburan); pemilihan teknologi yang tepat untuk diterapkan pada bijih besi yang berkadar rendah; mendorong investor untuk terus merealisasikan program yang menjadi target pemerintah; pengolahan bijih besi hingga pada produksi untuk menghasilkan cool rolled coil (CRC) dan hot rolled coil (HRC), tin plate dan yang lainnya melalui konsep custom plant dan cluster industry yang terintegrasi. Perlu dikembangkan pola kerjasama perusahaan atau investor lokal dengan luar negeri, seperti yang dikembangkan PT KS, lebih baik lagi seperti dengan China yang telah menguasai teknologi pengolahan/pemurnian bijih besi asal Indonesia. Peran bank sebagai agen pembangunan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan industri baja nasional yang membutuhkan pendanaan. Pembuatan regulasi untuk mendorong sinerginya rantai industri, dengan dukungan kajian Domestic Market Obligation (DMO) Hulu dan DMO Hilir peleburan.

Konsep Industri Perkapalan Nasional

Di Indonesia terdapat banyak galangan kapal berdasarkan jenis kepemilikannya terbagi dua yaitu galangan kapal yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh perorangan (Galangan kapal BUMS) dan galangan kapal yang dimiliki oleh negara di bawah pengelolaan kementerian BUMN (Galangan kapal BUMN). Sehingga dalam pengembangan industri perkapalan nasional diperlukan dua alternatif untuk meningkatkan daya saing industri perkapalan. Pengembangan sektor swasta dengan menggunakan klaster industri perkapalan dan sektor BUMN menggunakan holding industri. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Indonesia dan Pertahanan Lautnya

Pembahasan terhadap kedaulatan bagian laut Indonesia telah memberikan banyak kajian umum tentang konsep kekuatan laut dan pengembangan sektor maritim Indonesia. Banyak kajian yang memiliki tujuan untuk mengkaji potensi Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer laut yang kuat dan menjadi negara "sea power". Namun saat ini, melalui berbagai kajian bidang ekonomi dan politik, terungkap bahwa Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan potensi kelautan yang dimilikinya. Sumber daya kelautan cukup melimpah di Indonesia, namun yang termanfaatkan kurang dari 10 persen. Tercatat bahwa sektor maritim hanya memberikan kontribusi 11,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika dilihat dari sisi ketahanan pangan dalam konteks perikanan, Indonesia kini menghadapi tiga tantangan besar, yaitu illegal fishing, over-fishing, dan keterbatasan



dana. Diperkirakan hal ini menjadikan Indonesia menderita kerugian sebesar \$ 24,2 miliar dari penangkapan ikan ilegal setiap tahun, dengan lebih dari 5.400 kapal penangkap ikan asing saat ini menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, serta kehilangan sekitar 5 juta ton sumber daya ikan dari penangkapan ikan yang berlebihan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk bergerak menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan maritim yang kuat. Salah satu contohnya adalah kata-kata Poros Maritim Global atau Global Maritime Fulcrum (GMF) yang merupakan istilah utama yang kerap diungkapkan Presiden Jokowi saat menjabarkan program visi dan misinya pada masa kampanye pemilihan presiden dan saat dilantik sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia. Presiden Jokowi melihat bahwa isu kelautan telah lama diulas dan dibahas dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga ia memanfaatkan momentum ini sebagai cara untuk mewujudkan kekuatan tersebut (Saragih et al, 2018).

Strategi untuk menggaungkan “sea power” kemudian menekankan pada empat bidang diplomasi, yaitu menonjolkan identitas samudera Indonesia dalam hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, meningkatkan citra internasional Indonesia melalui pelaksanaan diplomasi “medium power”, memperluas kehadiran Indonesia di kawasan India dan Samudra Pasifik, dan memperkuat diplomasi publik Indonesia (Marsetio, 2017). Strategi “sea power” ini didasarkan pada pembangunan nasional dan bertujuan untuk mengintegrasikan target pembangunan dalam negeri dan politik luar negeri dalam upayanya membangun Indonesia menjadi kekuatan menengah. Terlebih lagi, pergerakan kekuatan maritim saat ini sedang berada pada kawasan Indo Pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai arus utama dengan cakupan wilayah laut yang luas.

Kemandirian Industri Pertahanan

a. Memproduksi senjata menjadi tuntutan sejumlah Negara di dunia. Kemandirian ini bukan sekadar menghemat biaya, juga untuk menghindari tekanan Negara produsen besar senjata yang sering ikut campur lebih jauh urusan pertahanan. Tuntutan ini disadari pula oleh Indonesia. Sejak sepuluh tahun terakhir Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan senjata militer secara lebih mandiri, terutama senjata ringan untuk pasukan infanteri dan kepolisian. Beruntung sejak lama RI memiliki industri senjata ringan sendiri, yaitu PT Pindad (Persero). Industri senjata yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda tersebut (usianya sekira 96 tahun), kini semakin terasa perannya untuk memenuhi kebutuhan senjata ringan militer Indonesia (TNI/Tentara Nasional Indonesia).

b. Pada sisi lain, dari sejumlah pengalaman terlalu bergantungnya militer kepada produk asing, memberikan pengaruh lain yang kurang baik. Di antaranya, tak jarang terjadi ketidaksesuaian produk senjata yang digunakan dengan karakteristik pasukan dan kondisi alam suatu negara. Dengan diproduksinya senjata secara mandiri oleh PT Pindad, maka kesesuaian dengan kebutuhan militer Indonesia diharapkan semakin terpenuhi.

c. Untuk industri pertahanan yang lain seperti industri dirgantara yang merupakan bagian utama dari industri pertahanan udara memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga wilayah udara Indonesia dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan negara lain. Berbagai kontribusi positif telah dijelaskan di depan, sehingga tidak ada keraguan bahwa industri dirgantara yang keberadaannya saat ini sangat memperhatikan harus diupayakan untuk dipertahankan.

d. Industri Pertahanan di sektor Kelautan, selama ini hanya terfokus pada PT. PAL saja. Padahal selama ini ada berbagai industri sejenis di Indonesia yang ada di antaranya PT DOK dan perkapalan, PT GALKAP KODJA, PT RUKINDO dan lain-lain. Padahal PT PAL saja selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang meyakinkan bagi kebutuhan pertahanan sektor kelautan kita. Selama ini, PT. PAL baru menghasilkan 4 (empat) kapal perang Tipe FPB yaitu KRI HIU, KRI Todak dan KRI Layang serta yang terakhir KRI Lemadang. Selebihnya PT. PAL membangun kapal-kapal niaga.

e. Kondisi dari ketiga ranah industri tersebut, yaitu industri peralatan militer, dirgantara dan kelautan memerlukan dukungan semua pihak baik dari pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan dunia usaha, lembaga penelitian dan seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terutama pada regulasi dan kebijakan terkait dengan pemberian kredit dengan bunga lunak, pemasaran Dalam Negeri maupun hubungan antar Negara untuk menggunakan



produk peralatan militer buatan Indonesia (Government to Government). Di samping itu juga terkait dengan dukungan terhadap pendanaan dan kebijakan terhadap lembaga penelitian seperti BPPT, LIPI dan lembaga penelitian yang dimiliki perguruan tinggi. Sebab dari kerjasama dan hasil penelitian yang dilakukan lembaga-lembaga penelitian tersebut, akan menghasilkan penguasaan teknologi produksi peralatan militer yang lebih baik dan yang tidak kalah penting adalah penguasaan teknologi pengolahan bahan baku industri pertahanan.

f. Apabila hubungan ini sudah dapat dipenuhi, maka pengembangan industri pertahanan menuju kemandiriannya secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan dapat dicapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai data-data yang didapatkan dalam pelaksanaan penelitian, maka disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh industri perkapalan dan industri, pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi dari pemerintah pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan regulasi mengenai pengelolaan manajemen ini untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku industri perkapalan yaitu Permasalahan internal lebih mengarah pada kebijakan regulasi pemerintah dalam bidang pengelolaan industri perkapalan, intensif pajak, kualitas sumber daya manusia, usia peralatan produksi dan Permasalahan external yang dihadapi antara lain komitmen integrasi dan kerja sama industri galangan BUMN dan swasta, pembentukan kluster industri, koordinasi BUMN jasa dan BUMN owner dalam pengadaan dan maintenance kapal, dukungan perbankan dalam pendanaan kapal baru dan kebijakan fiskal dan insentif pemerintah terhadap barang impor. Begitupun dengan regulasi terkait manajemen dalam peningkatan TKDN pada industri galangan kapal nasional, khususnya untuk perencanaan pengeneralisasian desain ukuran kapal, komponen-komponen kapal dan barang yang dibutuhkan oleh industri perkapalan selama beberapa tahun ke depan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Perusahaan BUMN diamanatkan oleh pemerintah untuk berperan dalam kemandirian Alutsista. Dalam regulasi tersebut ditekankan untuk memanfaatkan kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Alutsista Indonesia Sehingga diperlukan pengelolaan manajemen antar industri pertahanan atau perkapalan dengan industri pendukung lainnya. Secara regulasi sudah sangat baik karena pemerintah sangat ingin memandirikan industri pertahanan nasional tinggal bagaimana pengelolaan manajemen pelaksanaan dilapangan yang memerlukan penanganan khusus sehingga industri pertahanan atau industri perkapalan dapat berkembang sesuai dengan harapan pemerintah. Selain itu, konsep dasar yang digunakan industri perkapalan dalam mendukung keamanan maritim adalah dengan menggunakan Triple Helix pemangku kebijakan Industri pertahanan yaitu Pemerintah (Kemenperin, KemenBUMN dan Kemhan) Industri Pertahanan (BUMN dan BUMS) dan Pengguna Alutsista (TNI AL).

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran secara teoritis dan praktis yang berhubungan dengan pengelolaan industri perkapalan dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia. Sebagai berikut : Pertama Saran Teoritis, Melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengembangan kluster industri perkapalan serta dapat menganalisa daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah kluster industri perkapalan. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri perkapalan dengan menggunakan konsep holding industry perkapalan (National Shipbuilding & Heavy Industries). Melakukan kajian strategi holding industri perkapalan agar dapat meningkatkan kualitas daya saing perusahaan. Melakukan kajian mengenai hasil Transfer of Technology dan offset yang dilakukan oleh industri pertahanan Indonesia dengan produsen Alutsista dari luar negeri. Kedua Saran Praktis PT. PAL Indonesia sebagai Industri inti seharusnya melakuakn koordinasi dan kerja sama kepada perusahaan BUMN dan swasta yang memiliki kompetensi untuk memproduksi komponen dan material kapal. Kementerian Perindustrian dapat melakukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengambanan industri perkapalan dengan menggunakan konsep kluster industri pada daerah yang memiliki potensi terhadap industri perkapalan.



Serta melakukan kajian lokasi yang cocok untuk pengembangan klaster di Indonesia. Kementerian BUMN dapat melakukan kajian dan mengaplikasikan pembentukan holding industri perkapalan (National Shipbuilding & Heavy Industries).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] CNA. (2016, June). Becoming a Great Maritime Power: A Chinese Dream. Diakses dari <https://www.cna.org/news/events/china-and-maritime-power#:~:text=In%20November%202012%2C%20then%20President,strong%20or%20great%20maritime%20power>. Diakses pada 20 Februari 2022
- [2] Harjo Susmoro, Haris Djoko Nugroho dan Yanuar Handwiono, “Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI-Negara Tetangga,” Jakarta: Pushidrosal, 2019.
- [3] Harrison, Kevin & Boyd, Tony. (2018). The state and sovereignty. 10.7765/9781526137951.00005.
- [4] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). Sovereignty and Jurisdiction. E-Library KKP.go.id
- [5] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Indonesian Defence White Paper 2015. Jakarta: Kemenhan RI
- [6] Kurc, C. et al. (2020). Defence Industries in the 21st Century: A Comparative Analysis. PricewaterhouseCoopers Global Aerospace and Defence Leader.
- [7] Miyagiwa, K. (1991). Oligopoly and Discriminatory Government Procurement Policy. *American Economic Review*, 81(5). 1320-1328.
- [8] NAVY. (2020). Advantage at Sea: Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power. USA Media Defense
- [9] Phelan, G. R. (1954). Sea Power and Strategies for The Control Of The Seas. *Naval War College Review*, 6(10).
- [10] Saragih, H. et al. (2018). Indonesian National Power to Achieve the Global Maritime Fulcrum. 10.2991/amca-18.2018.14.
- [11] Silva, A. (2017). The Enabling Power of the Oceans. *Contexto Internacional*. 39. 10.1590/s0102-8529.2017390200002.
- [12] Soewarso, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Keamanan Matra Laut, Jakarta, 1986.
- [13] Suhirwan, et al. (2021). National Defense Strategy. CV. Aksara Global Akademia
- [14] Victoria, A. (2019). Maritime Power. 10.13140/RG.2.2.24595.22566.
- [15] Xue, S. & Xu, L. (2016). Indonesia's 'Sea Power' Strategy and Maritime Cooperation with China. China Academic Journal Publishing House.
- [16] Antoni, Hendro. 2022. “Pengembangan Pembangunan Industri Perkapalan Nasional Dalam Mendukung Keamanan Pertahanan Indonesia Untuk Menjaga Kedaulatan Perairan Di Wilayah Indonesia.” *Jurnal Maritim Indonesia* 10 (1): 92–102. <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/105>.
Dr. R. Luki Karunia, SE., AK ME. 2019. “Optimalisasi Peran Industri Jasa Maritim Melalui Peningkatan Armada Pelayaran Nasional Dan Pelabuhan Dalam Rangka Mempertahankan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.” *Journal of Public Policy Applied Administration* 1 (2): 111–18.